

Pengembangan Kebijakan Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

Chreisy Kardinalia Fransisca Mandagi¹, Gracia Indri Ludjiwadu^{2*}, Syalomitha Imanuella Jacobus³, Chariswan Austin Lie⁴, Juvelin Cristiani Liem⁵, Laura Maria Palar⁶, Injilio Yeremia Christiano Mondigir⁷, Beylin Cheryn Kawung⁸

¹Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Indonesia

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Indonesia

*Corresponding author: gracialudjiwadu121@student.unsrat.ac.id

Abstrak: Kebijakan kesehatan merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Pengembangan kebijakan kesehatan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses pelayanan kesehatan, rendahnya partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, serta dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan kebijakan kesehatan serta peran pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan yang efektif, inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode *literature review* dengan menganalisis artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar dan PubMed menggunakan kata kunci *Pengembangan Kebijakan Kesehatan dan Pemangku Kepentingan/Stakeholder*. Artikel yang digunakan merupakan publikasi tahun 2022–2026 dan dipilih berdasarkan kesesuaian topik. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterkaitan hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam pengambilan kebijakan kesehatan, namun keterlibatan stakeholder lain berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, kualitas, transparansi, dan implementasi kebijakan. Pendekatan *collaborative governance* mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meskipun masih terdapat hambatan berupa ego sektoral, rendahnya transparansi, keterbatasan partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, serta belum optimalnya penerapan *evidence-based policy*. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berbasis bukti ilmiah diperlukan untuk menghasilkan kebijakan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: pengembangan kebijakan, pemangku kepentingan, kesehatan.

Abstract: Health policy is an essential component of public policy aimed at improving population health through the planning, implementation, and evaluation of health programs. Effective health policy development requires the involvement of multiple stakeholders, including governments, healthcare professionals, academics, community organizations, the private sector, and local communities. However, its implementation continues to face several challenges, such as unequal access to healthcare services, limited public participation, conflicts of interest, and government dominance in decision-making. This study aimed to analyze health policy development and the role of stakeholders in supporting effective, inclusive, transparent, and sustainable health policies. A literature review method was employed by analyzing scientific articles retrieved from Google Scholar and PubMed using the keywords Health Policy Development and Stakeholders. Articles published between 2022 and 2026 were selected based on their relevance to the research topic. The collected data were analyzed descriptively to identify similarities, differences, and relationships among previous studies. The findings indicate that the government remains the dominant actor in health policy decision-making. Nevertheless, the active involvement of other stakeholders significantly contributes to improving policy effectiveness, quality, transparency, and successful implementation. The collaborative governance approach strengthens cross-sectoral coordination and stakeholder participation, although challenges such as sectoral ego, limited transparency, inadequate public participation, conflicts of interest, and the suboptimal application of evidence-based policy remain. Therefore, health policy development requires strong cross-sector collaboration and evidence-based decision-making to produce policies that are inclusive, effective, responsive, and sustainable.

Keywords: policy development, stakeholders, health.

Pendahuluan

Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang disusun untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Sektor kesehatan memiliki sifat yang kompleks dan khas karena melibatkan banyak pihak serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, kebijakan kesehatan merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang perlu dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif agar mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Nurhayati, Telaumbanua, Daeli, Agustin, Khairunisa, Aulia, Syifaurreidha, 2025).

Proses penyusunan kebijakan kesehatan meliputi beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem kesehatan. Selain itu, kebijakan kesehatan juga harus bersifat adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta mampu merespons berbagai tantangan baru, termasuk situasi krisis kesehatan global (Marmot, Allen, Goldblatt, Herd, & Morrison, (2020)).

Walaupun secara konseptual kebijakan disusun untuk menjamin keadilan dan efisiensi, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas di lapangan. Hal ini terutama terlihat pada ketidakmerataan akses layanan, distribusi intervensi yang belum merata, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Freeman, Baum, Javanparast, Labonté, & Lawless (2020).

Dalam perspektif administrasi publik, keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan menjadi faktor krusial untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan bahwa keberhasilan suatu inisiatif sangat bergantung pada bagaimana hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dikelola secara efektif. Pemangku kepentingan sendiri mencakup berbagai individu maupun kelompok, seperti pemerintah, karyawan, pemasok, komunitas, serta pihak lain yang memiliki kepentingan atau dapat memengaruhi jalannya suatu inisiatif (Freeman, R.E., 2023).

Perumusan kebijakan kesehatan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, termasuk pemerintah, kelompok profesional, sektor industri, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat luas. Setiap pihak memiliki pendekatan dan tingkat pengaruh yang berbeda dalam memengaruhi kebijakan, baik melalui jejaring politik, pembentukan koalisi, maupun kegiatan advokasi (Nasution, Putra, Salwa, Cicilia, Tanjung, Sahdiyah, & Maharani, (2025).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar sektor kesehatan, dapat secara efektif mendukung proses pengembangan dan perundingan kebijakan, strategi, serta rencana kesehatan nasional. Berbagai

stakeholder dengan latar belakang keahlian yang berbeda dapat berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih bermakna, yang kemudian menjadi landasan dalam menetapkan nilai, tujuan, serta arah umum praktik kesehatan yang baik (WHO, 2021).

Oleh karena itu, artikel ini disusun sebagai kajian literatur yang mereview berbagai hasil penelitian terkait pengembangan kebijakan kesehatan dengan fokus pada peran stakeholder/pemangku kepentingan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika keterlibatan aktor-aktor tersebut dalam setiap tahapan kebijakan serta implikasinya terhadap efektivitas sistem kesehatan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah literature review atau tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan kebijakan kesehatan dan peran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelayanan kesehatan. Pencarian literatur dilakukan melalui database Google Scholar dan PubMed menggunakan kata kunci "Pengembangan Kebijakan Kesehatan" dan "Pemangku Kepentingan/Stakeholder". Artikel yang dipilih merupakan artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2022–2026 agar data dan informasi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan kesehatan saat ini.

Artikel yang digunakan berfokus pada penerapan kebijakan kesehatan, proses pengembangan kebijakan, serta hubungan pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan. Data dalam kajian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bukan melalui pengamatan langsung. Selanjutnya, literatur yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui keterkaitan, persamaan, dan perbedaan hasil penelitian terkait topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1. Hasil Literature Review

Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
Irfan Sazali Nasution, Alamsyah Putra, Nabila Hafidz Salwa, Rizka Cicilia, Trianisa Ulan Dari Tanjung, Halimatus Sahdiyah, dan	Interest (Kepentingan) Para Pihak dalam Kebijakan Kesehatan.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kepentingan berbagai aktor dalam kebijakan kesehatan,	Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui kuesioner	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan di Indonesia masih sangat dipengaruhi pemerintah, dengan

Deswita Maharani (2025).	menganalisis pengaruhnya terhadap proses kebijakan di Indonesia, serta memahami upaya mewujudkan kebijakan yang inklusif dan adil.	dan tinjauan pustaka, serta dianalisis menggunakan analisis aktor untuk melihat relasi kuasa dan kepentingan.	76,9% responden menilai pemerintah sebagai aktor paling dominan dalam pengambilan kebijakan. Sebanyak 38% responden menilai kepentingan ekonomi lebih dominan dibanding sosial, sedangkan 34% bersikap netral. Transparansi kebijakan juga dinilai masih rendah, di mana 42,3% responden menilai proses pembuatan kebijakan tidak transparan dan hanya 23,1% yang menilai transparan. Selain itu, 69,2% responden berpendapat sektor swasta berpartisipasi untuk meningkatkan layanan kesehatan, sementara 42,3% tidak setuju bahwa kebijakan saat ini berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. Sebanyak 73,1% responden juga menilai kepentingan akademik harus berfokus pada penelitian berbasis bukti dalam pengambilan keputusan.	
Jennifer Petkovic, Olivia Magwood, Lyubov Lytvyn, Joanne Khabsa, Thomas W. Concannon, Vivian Welch, dkk. (2023).	Key Issues for Stakeholder Engagement in the Development of Health and Healthcare Guidelines.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas isu-isu utama dalam keterlibatan multi-pemangku kepentingan pada pengembangan pedoman kesehatan dan layanan kesehatan, serta mendukung pengembangan panduan keterlibatan	Penelitian dilakukan melalui pembentukan Multi-Stakeholder Engagement (MuSE) Consortium yang melibatkan lebih dari 120 individu dari berbagai negara. Peneliti mengidentifikasi 10 kelompok pemangku kepentingan, merekrut 2-4 co-	Penelitian mengidentifikasi enam isu utama dalam keterlibatan pemangku kepentingan pada pengembangan pedoman kesehatan, yaitu penentuan peran stakeholder, seleksi stakeholder yang adil, tingkat keterlibatan, evaluasi efektivitas,

		stakeholder dalam seluruh tahapan penyusunan pedoman.	lead tiap kelompok dengan metode snowballing, serta mengadakan pertemuan virtual selama 3 hari pada Februari 2021 untuk membahas keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pedoman kesehatan.	dokumentasi dan transparansi, serta pengelolaan konflik kepentingan. Penelitian juga menyebutkan 10 kelompok stakeholder utama, yaitu pasien, pengasuh dan organisasi advokasi pasien, masyarakat umum, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, pembayar layanan kesehatan, pendana riset kesehatan, editor jurnal, peneliti, pembuat produk kesehatan, dan manajer program kesehatan. Keterlibatan multi-stakeholder dinilai dapat meningkatkan kualitas, relevansi, transparansi, dan penerimaan pedoman kesehatan.
Mara Ipa, Yuneu Yuliasih, Endang Puji Astuti, Agung Dwi Laksono, dan Wawan Ridwan (2023)	Stakeholders' Role in The Implementation of Stunting Management Policies in Garut Regency.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanganan stunting	Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut mulai April hingga Juli 2021. Informan kunci termasuk pemangku kebijakan lintas program dipilih dari berbagai tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Semua informan diwawancara, dan data wawancara dianalisis dengan teknik analisis konten dan disajikan secara deskriptif.	Hasil analisis pemetaan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki kontribusi, serta pengaruh tertinggi terhadap keberhasilan program penurunan stunting, disusul oleh perangkat daerah sektor kesehatan dan infrastruktur (Dinas Kesehatan, BAPPEDA, DPMD, Dinas PPKBPPPA, dan PUPR) termasuk dalam stakeholder utama yang berperan penting dalam pelaksanaan program. Namun,

				<p>pengembangan kebijakan ini belum berjalan optimal karena masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, kurangnya sosialisasi awal yang menyebabkan pembagian tugas tidak merata serta aktivitas antar-pembuat kebijakan lokal yang belum sepenuhnya bersinergi dan terintegrasi (Ipa et al., 2023).</p>
<p>Alan Sulistyو dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2024)</p>	<p>Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis proses collaborative governance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan pendekatan post-positivistik dan metode kualitatif.</p>	<p>Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam para pemangku kepentingan dan narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berasal dari 13 stakeholder.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, organisasi sosial, akademisi, komunitas, media, dan lembaga kesehatan. Kolaborasi dilakukan melalui dialog, penyusunan RAD, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pembentukan TPKJM. Dampaknya meliputi peningkatan koordinasi, pengembangan kebijakan, serta meningkatnya kapasitas dan kesadaran masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya komitmen beberapa aktor, keterbatasan</p>

				berbagi informasi, dan belum optimalnya penggunaan data kuantitatif untuk evaluasi program (Sulistyo & Rahayu, 2024).
Septo Pawelas Arso, Eka Yuni Fatmasari, Zabrina Rizky Yudana (2024)	Analisis Peran Stakeholder dalam Program Inovasi Puskesmas di Puskesmas Rangkaian Jaya Baru	Menganalisis peran stakeholder berdasarkan <i>power</i> dan <i>interest</i> dalam program pencegahan hipertensi pada remaja di wilayah kerja Puskesmas Rangkaian Jaya Baru.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan teknik purposive sampling.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ADDiTS melibatkan berbagai stakeholder dalam pengembangan program kesehatan remaja, dengan Kepala Puskesmas, PJ UKM, dan Ketua Kader sebagai pelaksana utama, serta lurah, tenaga medis, PKK, dan RW mendukung koordinasi dan sosialisasi. Penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder agar program kesehatan berjalan optimal.
Meyldha Indah Lestari, Jubaida F Abdullah (2025).	Interaksi dan Pengaruh Pemangku Kepentingan terhadap Arah Kebijakan Kesehatan	Penelitian ini bertujuan menggambarkan kepentingan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan kesehatan serta menganalisis pengaruh dan interaksi mereka dalam membentuk kebijakan pada tingkat mikro dan makro, guna mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner terbuka terkait peran, pengaruh, kepentingan, dan keterlibatan stakeholder dalam kebijakan kesehatan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan pola kepentingan dan interaksi antaraktor.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menempatkan pemerintah sebagai aktor paling dominan dalam proses kebijakan kesehatan. Sebagian responden menilai kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan kepentingan sosial, sementara tingkat kepercayaan terhadap transparansi kebijakan masih relatif rendah. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dipandang mampu meningkatkan

					<p>kualitas layanan kesehatan, meskipun kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Temuan ini juga memperlihatkan adanya dukungan kuat terhadap penggunaan penelitian ilmiah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan kesehatan, sehingga diperlukan peningkatan transparansi, keberpihakan kepada kelompok rentan, serta penguatan kebijakan berbasis bukti dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan.</p>
<p>La Unga Samsi, Sri Yuniarsih, Andi Alim, Abdul Gafur</p>	<p>Studi Peran Kualitatif Pemangku Kepentingan pada Pengobatan TB dalam Program Indonesia Sehat.</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam tentang pemangku kepentingan berdasarkan peran pemangku kepentingan dalam program pengobatan TB paru di Puskesmas Bungoro Kabupaten Pangkep.</p>	<p>Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang disertai observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Bungoro dan Penderita TB paru.</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah pemangku kepentingan dalam program pengobatan TB paru di Puskesmas Bungoro terdiri dari pemangku kepentingan utama dan pemangku kepentingan kunci. Pemangku kepentingan utama yaitu penderita TB paru yang berperan dalam menjalani pengobatan secara mandiri, mematuhi arahan petugas kesehatan, serta melakukan upaya pencegahan agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Sementara itu, pemangku kepentingan kunci yaitu Dinas</p>	

Kesehatan dan Puskesmas Bungoro berperan sebagai pelaksana, fasilitator, serta melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program pengobatan TB paru. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti tokoh masyarakat, RT/RW, kelurahan, dan lembaga swadaya masyarakat masih belum optimal sehingga diperlukan dukungan lebih luas untuk meningkatkan keberhasilan program pengobatan TB paru.

Pembahasan

Formulasi kebijakan kesehatan merupakan instrumen strategis yang mencakup tahapan perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi sistematis berbasis bukti ilmiah (*evidence-based*). Tujuan utamanya adalah mendongkrak kualitas kesehatan publik secara inklusif. Dalam ekosistem ini, pemangku kepentingan (*stakeholder*) memegang peran krusial karena setiap entitas membawa agenda, otoritas, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang bervariasi dalam mengarahkan orientasi kebijakan. Aktor-aktor ini bergerak secara lintas sektor, mulai dari jajaran birokrasi pemerintah, praktisi medis, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), sektor korporat, media massa, hingga masyarakat selaku penerima manfaat langsung. Pelibatan multipihak secara aktif menjadi prasyarat mutlak lahirnya kebijakan yang demokratis, transparan, dan aplikatif. Mengingat kompleksitas isu kesehatan modern, pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) mutlak diperlukan karena tidak ada satu pun institusi yang mampu menyelesaikan problematika kesehatan secara mandiri. Secara empiris, efektivitas kebijakan kesehatan sangat bertumpu pada sinergi lintas sektoral, keterbukaan informasi, pelibatan publik, komunikasi yang intensif, serta pemanfaatan data ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan strategis (Putri, N.A. and Permana, I., 2025).

Persamaan Antar Artikel

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketujuh artikel, ditemukan beberapa persamaan yang menunjukkan keterkaitan antar penelitian. Seluruh artikel sepakat bahwa keterlibatan stakeholder memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan kesehatan. Pemerintah masih dipandang sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan paling besar dalam proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dinamika hubungan antar aktor dan proses pengembangan kebijakan. Seluruh studi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan di masyarakat. Komunikasi yang baik, koordinasi yang terarah, serta transparansi menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan. Meskipun demikian, sebagian besar artikel menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder non-pemerintah masih tergolong rendah sehingga keterlibatan masyarakat belum optimal. Selain itu, seluruh penelitian menyoroti pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti ilmiah agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan Antar Artikel

Berdasarkan hasil telaah artikel, diketahui bahwa seluruh penelitian membahas peran stakeholder dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan dengan fokus yang berbeda-beda. Artikel Interest (Kepentingan) Para Pihak dalam Kebijakan Kesehatan menyoroti standardisasi keterlibatan stakeholder secara sistematis dalam proses kebijakan kesehatan nasional. Sementara itu, artikel Key Issues for Stakeholder Engagement in the Development of Health and Healthcare Guidelines lebih menekankan pada dinamika kepentingan, konflik kepentingan, transparansi, serta dominasi pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Artikel Stakeholders' Role in The Implementation of Stunting Management Policies in Garut Regency membahas implementasi kebijakan stunting dan hambatan birokrasi seperti ego sektoral serta lemahnya integrasi program. Selanjutnya, artikel Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berfokus pada collaborative governance melalui kemitraan lintas sektor dan mekanisme konsensus bersama. Artikel Analisis Peran Stakeholder dalam Program Inovasi Puskesmas di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru membahas inovasi program preventif hipertensi remaja berbasis kekuatan komunitas. Selain itu, artikel Interaksi dan Pengaruh Pemangku Kepentingan terhadap Arah Kebijakan Kesehatan menyoroti hubungan dan pengaruh stakeholder dalam pembentukan kebijakan pada tingkat mikro dan makro. Adapun artikel Studi Kualitatif Peran Pemangku

Kepentingan pada Pengobatan TB dalam Program Indonesia Sehat membahas peran stakeholder dalam keberhasilan terapi TB paru melalui pengembangan kebijakan, collaborative governance, dan inovasi program kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadi aktor yang paling dominan dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan kesehatan. Di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan dan pengaruh terbesar dalam menentukan arah regulasi kesehatan di masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan guna meningkatkan akses, mutu, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, keberhasilan program kesehatan, khususnya dalam sistem jaminan kesehatan publik, sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama antar stakeholder melalui pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media. Penelitian juga menemukan bahwa transparansi dalam proses penyusunan kebijakan masih belum optimal, terutama terkait keterbukaan informasi dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dalam berbagai studi, pendekatan collaborative governance dinilai sebagai model yang paling efektif untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperbaiki komunikasi antar aktor, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan (Elungan, A. N., & Tjenreng, M. B. Z. (2025).

Meskipun demikian, pengembangan kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dalam proses pengembangan kebijakan, konflik antar pemangku kepentingan, perbedaan nilai, dan pengaruh lingkungan merupakan hal yang sulit dihindari. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, perubahan perilaku, serta sistem yang digunakan. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya ego sektoral antar-instansi yang menyebabkan koordinasi menjadi kurang efektif. Partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah juga masih terbatas dan sering kali hanya bersifat formalitas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan kebijakan masih rendah sehingga memunculkan konflik kepentingan antar aktor. Permasalahan lainnya adalah rendahnya penggunaan data dan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya berbasis bukti ilmiah. Komitmen kerja sama antar sektor juga belum berjalan optimal, ditambah dengan lemahnya sistem data kuantitatif yang menghambat proses evaluasi kebijakan. Di sisi lain, beberapa regulasi kesehatan dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta masih terdapat kesenjangan informasi akibat kurang meratanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat (Maulana, D. (2025).

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan perlu lebih mengutamakan pendekatan evidence-based policy dengan menjadikan data epidemiologi dan hasil penelitian ilmiah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tata kelola kolaboratif perlu diperkuat melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan koordinasi, dan pembangunan rasa saling percaya antar stakeholder. Masyarakat juga perlu diposisikan sebagai mitra aktif dalam seluruh proses kebijakan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Transparansi dan integritas publik harus terus ditingkatkan dengan membuka akses informasi secara luas agar dapat meminimalkan konflik kepentingan. Selain itu, pendekatan Health in All Policies (HiAP) perlu diterapkan dengan melibatkan berbagai sektor di luar kesehatan, seperti pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, karena faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil literature review, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kebijakan kesehatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas. Pemerintah masih menjadi aktor paling dominan dalam proses pengambilan kebijakan, namun keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat melalui pendekatan collaborative governance. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dapat meningkatkan kualitas, efektivitas, transparansi, dan penerimaan kebijakan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti ego sektoral, rendahnya transparansi, keterbatasan partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, serta kurang optimalnya penggunaan data berbasis bukti dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar stakeholder, peningkatan partisipasi publik, penerapan evidence-based policy, serta tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan agar kebijakan kesehatan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Sam Ratulangi atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang diberikan selama proses penyusunan hingga terselesainya penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Arso, S. P., Fatmasari, E. Y., & Yudana, Z. R. (2024). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Inovasi Puskesmas di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 23(4), 291-299.
- Elungan, A. N., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 170-177.
- Freeman, T., Baum, F., Javanparast, S., Labonté, R., & Lawless, A. (2020). Mempromosikan kesetaraan kesehatan dalam proses kebijakan: Studi kasus dari Australia. *Health Promotion International*, 35(1), 32–44.
- Freeman, R.E., 2023. Stakeholder management: framework and philosophy. In *R. Edward Freeman's selected works on stakeholder theory and business ethics* (pp. 61-88). Cham: Springer International Publishing.
- Ipa, M., Yuliasih, Y., Astuti, EP, Laksono, AD, & Ridwan, W. (2023). Peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Garut. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 26-35.
- Lestari, M. I., & Abdullah, J. F. (n.d.). Interaksi dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan kesehatan. Universitas Mataram.
- Marmot, M., Allen, J., Goldblatt, P., Herd, E., & Morrison, J. (2020). Kesetaraan kesehatan di Inggris: Tinjauan Marmot 10 tahun kemudian. Institut Kesetaraan Kesehatan.
- Maulana, D. (2025). Strategi Kebijakan Kesehatan di Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 606-617.
- Nasution, I. S., Putra, A., Salwa, N. H., Cicilia, R., Tanjung, T. U. D., Sahdiyah, H., & Maharani, D. (2025). Interest (Kepentingan) Para Pihak dalam Kebijakan Kesehatan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 927-931.
- Nurhayati, N., Telaumbanua, N., Daeli, L.J.H., Agustin, D., Khairunisa, S.S., Aulia, J. and Syifaurreidha, N., 2025. Masalah Kebijakan Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), pp.45-55.
- Petkovic, J., Magwood, O., Lytvyn, L., Khabisa, J., Concannon, T. W., Welch, V., Todhunter-Brown, A., Palm, M. E., Akl, E. A., Mbuagbaw, L., Arayssi, T., Avey, M. T., Marusic, A., Morley, R., Saginur, M., Slingers, N., Teixeira, L., Ben Brahem, A., Bhaumik, S., ... Tugwell, P. (n.d.). Key issues for stakeholder engagement in the development of health and healthcare guidelines.
- Putri, N.A. and Permana, I., 2025. Analisis Bibliometrik: Peran Stakeholder dalam Eliminasi Tuberkulosis (TBC). *Jurnal kesehatan komunitas (Journal of community health)*, 11(1), pp.184-195.
- Sulistyo, A., & Rahayu, A. Y. S. (2024). Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 13(3).
- World Health Organization (WHO). (2021) National health policies, strategies and plans: engaging stakeholders. Geneva, Switzerland.
- Yuniarsih, S., Alim, A., & Gafur, A. (2023). Studi Kualitatif Peran Pemangku Kepentingan pada Pengobatan TB dalam Program Indonesia Sehat. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 9(2), 249-260.